ANALISIS PENDAPATAN USAHA *PURSE SEINE* DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA NIZAM ZACHMAN JAKARTA (PPSNZJ) JAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD AMIN
1622080449

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN
JURUSAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2020

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENDAPATAN USAHA *PURSE SEINE* DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA NIZAM ZACHMAN JAKARTA (PPSNZJ) JAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD AMIN
1622080449

Tugas Akhir/Skripsi ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jurusan Teknologi Kemaritiman Politeknik PertanianNegeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II
Erna, S.Pi,M.Si	**Ir.Syamsul Hadi, M.Si**
NIP.19721213 199702 2 001	NIP.196203191989031001

Mengetahui :

Direktur,	Ketua Jurusan,
DR. Ir. H. Darmawan, M.P	**Syamsul Marlin Amir,ST**
NIP. 196702021998031002	NIP. 197905072005011001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul	: Analisis Pendapatan Usaha *Purse Seine* di Pelabuhan perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) Jakarta
Nama Mahasiswa	: Muhammad Amin
Nim	: 1622080449
Program Studi	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Jurusan	: Teknologi Penangkapan Ikan

Menyetujui,

Tim Penguji :

1. Erna, S.pi, M.si (.....)
2. Ir. Syamsul Hadi, M.Si (.....)
3. Eka Apriliya Handayani, S.Pd, M.Pd (.....)
4. Sitti Muslimah Bachrum, S.Pi, M.P (.....)

Menyetujui,
Ketua Program Studi,

Sitti Muslimah Bachrum, S.pi, M.P.
NIP. 19710605 199703 2 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memproleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengatuhuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang perna ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacuh dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, Juni 2020
Yang menyatakan,

Muhammad Amin

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dankaruani-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”**ANALISIS PENDAPATAN USAHA *PURSE SEINE* DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA (PPSNZJ).**

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma-4 di Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan. Salam dan shalawat tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah bagi umat manusia.

Alhamdulillah setelah menjalani proses pembelajaran yang tidak singkat di Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan, akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsi yang merupakan studi akhir. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan dan berbagai hambatan. Namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak maka hambatan tersebut dapat diatasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Usman Paga dan ibunda tersayang Suriyani terlah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.

2. Bapak Dr. Ir. Darmawan, M.P. selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan.
3. Bapak Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si. selaku Ketua Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan.
4. Ibu Sitti Muslimah Bachrum, S.Pi., M.P. selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene dan Kepulauan serta selaku Penasehat Akademik selama penulis mengikuti pendidikan.
5. Ibu Erna, S.pi,M.Si.selaku pembimbing I dan Bapak Ir.Syamsul Hadi, S.Pi, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikirannya, meluangkan waktunya yang begitu berharga untuk memberi bimbingan dan pengarahan dengan baik.
6. IbuSitti Muslimah Bachrum, S.Pi., M.P.dan Ibu Eka Aprilia Handayani, S.Pd,M.Pd., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik dan arahan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan, terkhusus kepada seluruh dosen Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikananyang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Teknologi Penangkapan Ikan.
8. Seluruh staf pegawai Jurusan Teknologi Penangkapan Ikanatas segala arahan, dan bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti pendidikan terkhusus kepada staf Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Kak Sabir atas segala bantuannya.

9. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakartabeserta jajarannyasebagai institusi yang bersedia menerima peneliti untuk melaksanakan penelitian di tempat tersebut.

   Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang berkecimpung dalam dunia pelabuhan perikanan

Pangkep, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI iii

PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Manfaat Penelitian 3

BAB I. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelabuhan Perikanan 4
2.1.1 PengertianPelabuhan Perikanan 4
2.1.2 Pelabuhan perikanan samudera 6
2.2 Fungsi Pelabuhan perikanan 7
2.3 Tempat Pelelangan Ikan 10
2.4 Unit penangkapan *purse seine* 14
2.4.1 Kapal Perikanan 14
2.4.2 Alat Penangkapan Ikan 15
2.4.3 Kegiatan Operasional penangkapan ikan 16

2.5 Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta 18
2.6 Tenaga Kerja dan Sistem Bagi Hasil 19

2.6.1 Tenaga Kerja 19

2.6.2Sistem Bagi Hasil 20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan tempat penelitian..... 21

3.2 Metode penelitian..... 22

BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan umum kota jakarta utara..... 23

4.1.1 Letak dan keadaan Geografis Jakarta Utara 23

4.1.2 Kependudukan Kota Jakarta Utara 25

4.2 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta 25

4.2.1 Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya PPS Nizam Zachman Jakarta 26

4.2.2 Fasilitas di PPS Nizam Zachman Jakarta 30

4.2.3 Pengelolaan PPS Nizam Zachman Jakarta 34

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Produksi Hasil Tangkapan *Purse Seine* 40

5.2 Pendapatan 41

5.3 Pembagian Pendapatan Cruh Kapal Dengan ABK Kapal….....43

5.4 Hubungan Antara Pendapatan Industri Perikanan *Purse Seine* Dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Dki Jakarta 44

5.5 Biaya Peyusutan Kapal dan Alat Tangkap..... 45

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 46

6.2 Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA 47

LAMPIRAN 49

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Kriteria Pelabuhan Perikanan Samudera 6

Tabel 3.1 Matriks Data 6

Tabel 4.1 Fasilitas Pokok di PPS Nizam Zachman Jakarta 31

Tabel 4.2 Fasilitas Fungsional di PPS Nizam Zachman Jakarta 32

Tabel 4.3 Fasilitas Penunjang di PPS Nizam Zachman Jakarta 34

Tabel 5.1 Rata-rata Produksi Hasil Tangkapan *Purse Seine* yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pamudera Nizam Zachman Jakarta 41

Tabel 5.2 Pendapatan Bersih yang diterima dari Usaha *Purse Seine* di PPS Nizam Zachman Jakarta 42

Tabel 5.3 Pembagian Hasil yang diterima Nelayan *Purse Seine* di PPS Nizam Zachman Jakarta 43

Tabel 5.5 Biaya Penyusutan Kapal dan Alat Tangka 45

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 4.2 Susunan Organisasi UPT PPS Nizam Zachman Jakarta 38

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1.Tabel Pendapatan Usaha *Purse Seine* 1 Kali Trip Berdasarkan Ukuran 148 GT 51

Lampiran 2.Tabel Pendapatan Usaha *Purse Seine* 1 Kali Trip Berdsarkan Ukuran 114 GT 51

Lampiran 3. Tabel Pendapatan Usaha *Purse Seine* 1 Kali Trip Berdasarkan Ukuran 97 GT 51

Lampiran 4.Dokumentasi Kegiatan Penelitian 52

ABSTRAK

Muhammad Amin, 1622080449, Analisis Pendapatan Usaha *Purse seine* di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ) Jakarta. (Dibimbing oleh Erna dan Syamsul Hadi)

Potensi sumber daya lautIndonesia selama ini telah dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan perekonomian, salah satunya adalah perikanan tangkap. Sumberdaya ikan merupakan potensi laut yang bersifat renewable dan common property. Dilihat dari data produksi nelayan *purse seine* yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta tahun 2016–2018, yang mengalami fluktuatif pada setiap tahunnya. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan usaha yaitu dengan meningkatkan produksi hasil tangkapan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakartapada bulan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2020. Tujuan penelitian untuk Mengetahui pendapatan usaha perikanan *purse seine* yang berpangkalan di PPS Nizam Zachman Jakarta.

Jenis Pendapatan yang diterima nelayan pada setiap sampel kapal *purse seine* berdasarkan hasil perhitungan pembagian hasil untuk nelayan ABK ABK memperoleh pendapatan Rp.628.916.666/trip untuk kapal 148 GT, Rp.176.333.333/trip untuk kapal 114 GT, dan Rp.153.000.000/trip untuk kapal 97 GT. Terlihat bahwa pendapatan nelayan pada kapal 148 GT lebih besar dibanding pendapatan nelayan pada kapal 114 GT maupun 97 GT.

Kata kunci : *Purse Seine*, Produksi, Pendapatan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi sumber daya lautIndonesia selama ini telah dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan perekonomian, dimana salah satunya adalah perikanan tangkap. Perikanan tangkap itu sendiri merupakan aktivitas yang paling umum dibicarakan dibandingkan dengan aktivitas lain dibidang perekonomian sumber daya. Sumberdaya ikan merupakan potensi lautyang bersifat renewable dan common property. Hal ini memungkin-kan setiap orang berhak dalam mengeks-ploitasi sumber daya tersebut karena berpandangan bahwa penangkapan tidak menjadi faktor utama menurunnya populasi ikan yang disebabkan karena besarnya stok ikan yang tersedia (Sudirman dan Karim, 2008).

Dilihatdari data produksi nelayan *purseseine*yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta tahun 2016–2018, menunjukkan jumlah yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Produksi tahun 2016 sebesar 222.409 ton menurun menjadi 152.030 ton pada tahun 2018, kemudian naik menjadi188.410 ton pada tahun 2018 (PPNZJ). Ada beberapa kemung-kinanyang menyebabkan produksi tangkapan nelayan berfluktuasi, antara lain adalah pengaruh cuaca dan daerah penangkapan (fishing ground) sebagai limiting factor baik dalam jumlah maupun jenis yang tidak menentu. Selain itu juga dipengaruhi oleh jumlah dan harga input produksi yang digunakan pada setiap trip penangkapan.

Hal ini merupakan salah satu solusi atau alternatif untuk mendapatkan satuan teknis yang optimal dalam operasi penangkapan ikan yang bermuara pada

meningkatnya pendapatan nelayan usaha penangkapan ikan dalam meningkatkan pendapatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain meliputi jumlah hasil tangkapan, lama melaut, jumlah tenaga kerja (crew), dan frekuensi melaut (Yunawati, 2008). Selain itu, dapat diktahui pula faktor-faktor lain seperti yang dikemukakan oleh Yanti (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan nelayan juga dapat dipengaruhi oleh produksi hasil tangkapan, harga, ukuran kapal, dan biaya operasional. Sehubungan dengan itu, Talakua (2009) juga mengatakan bahwa produksi hasil tangkapan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha perikanan tangkap. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa peningkatan pendapatan usaha merupakan salah satu potensi dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi para pengusaha bidang perikanan tangkap dan nelayan itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pendapatan usaha perikanan *purse seine* di PPS Nizam Zachman Jakarta?
2. Bagaimana tingkat pendapatan nelayan purse seine jika dibandingkan dengan nilai Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI Jakarta?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

1. Menganalisis pendapatan usaha perikanan *purse seine* yang berpangkalan di PPS Nizam zachman Jakarta.

2. Membandingkan tingkat pendapatan nelayan *purse seine* dengan nilai Upah Minimum Propinsi (UMP) Propinsi DKI Jakarta

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan penilitian ini, yaitu dapat memberikan bahan informasi dan acuan bagi nelayan, indstri pelabuhan, maupuan peneliti tentang pendapatan usaha *purse seine* di PPNZJ.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelabuhan Perikanan

2.1.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan (Lubis, 2009a). Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 (DKP RI, 2009a) disebutkan bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 tahun 2006 (DKP RI 2006), pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan. Pelabuhan perikanan dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Berdasarkan ketiga definisi diatas, dapat dikatakan bahwa kegiatan perikanan khususnya perikanan tangkap tidak bisa berjalan secara optimal tanpa adanya pelabuhan perikanan. Keberadaan pelabuhan perikanan dapat mempermudah nelayan dalam mengorganisisr hasil tangkapan yang diperoleh dari laut yang akan didaratkan untuk selanjutnya didistribusikan, mulai dari bersandarnya kapal-kapal, berlabuh, sampai

kegiatan bongkar muat hasil tangkapan. Tentu saja kegiatan yang berlangsung di pelabuhan perikanan harus didukung oleh fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan perikanan tersebut. (Lubis)

Aspek-aspek pelabuhan perikanan secara terperinci menurut Direktorat Jenderal Perikanan 1994 adalah (Lubis, 2009a) :

1) Produksi

   Pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapan yang diperoleh.

2) Pengolahan

   Pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapan yang didaratkan.

3) Pemasaran

   Pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan tempat awal pemasaran hasil tangkapan yang didaratkan. Keberadaan pelabuhan perikanan dalam kegiatan perikanan tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk mendaratkan hasil tangkapan, tempat bersandar dan berlabuhnya kapal, atau sebagai tempat untuk bongkar muat kapal. Pelabuhan perikanan juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan. Kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan merupakan kegiatan yang dianggap cukup penting dalam industri perikanan, dimana ketiga aspek tersebut memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Setelah hasil tangkapan didaratkan oleh nelayan, perlu adanya pengolahan terhadap hasil

tangkapan tersebut agar hasil tangkapan memiliki nilai jual. Melalui proses pemasaran akan diperoleh suatu nilai atau harga yang layak yang dapat memberikan keuntungan kepada para penjual maupun pembeli. (Lubis)

5.4.1 Pelabuhan Perikanan Samudera

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang pelabuhan perikanan dinyatakan bahwa pelabuhan perikanan di Indonesia diklasifikasikan kedalam empat kelas yaitu, Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A), Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B), Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (Tipe D) (DKP, 2009b). Selanjutnya dinyatakan bahwa klasifikasi pelabuhan perikanan samudera adalah:

Tabel 2.1 Kriteria pelabuhan perikanan samudera

Kriteria	Pelabuhan perikan samudera (tipe A)
1. Daerah Penangkapan	Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah laut territorial, ZEEI, dan perairan internasional
2. Fasilitas Tambat Labuh	Memiliki fasilitas tambnat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangya 60 Gross Tonnage (GT)
3. Dermaga	Panjang dermaga sekurang-kurangya 300m
4. Kolam pelabuhan	Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 Gross tonnage (GT) kapal perikanan sekaligus dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m
5. Produksi	Jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 60 ton/hari
6. Pemasaran	Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor
7. Luas Lahan	Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 30 ha
8. Laboraturium	Memiliki laboraturium pengujian mutu hasilperikanan
9. Industri Perikanan	Terdapat industri perikanan

Sumber: KKP RI, 2016

Pembangunan pelabuhan perikanan di suatu wilayah harus disesuaikan dengan potensi sumber daya ikan yang tersedia di wilayah tersebut, potensi perikanan dan

sumber daya manusia yang tersedia, serta letak geografis dan kondisi perairan daerah tersebut. Hal inilah yang selanjutnya membedakan pelabuhan perikanan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga pelabuhan perikanan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam empat kelas seperti yang telah disebutkan diatas yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A), Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B), Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (Tipe D). Perbedaan pengklasifikasian pelabuhan perikanan tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaannya. Pelabuhan perikanan dibangun sesuai dengan karakteristik perikanan di suatu wilayah. Kemungkinan pemerintah beranggapan jika pelabuhan perikanan tidak diklasifikasikan, maka keberadaan pelabuhan tersebut akan dinilai tidak efisien dalam pengelolaannya. Misalnya, suatu daerah yang memiliki potensi untuk dibangun pelabuhan perikanan dengan tipe B akan tetapi di daerah tersebut dibangun pelabuhan perikanan dengan tipe A. Hal ini akan mengakibatkan banyaknya fasilitas pelabuhan yang tidak termanfaatkan secara optimal sehingga biaya pengadaan dan perawatan fasilitas tersebut tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. (KKP RI, 2016)

5.4 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan atau lingkungannya. Kegiatan ini mencakup praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasarannya (Lubis, 2009a).

Menurut penjelasan pasal 41A UU No. 45 Tahun 2009 (DPR RI, 2009), pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna

mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Selanjutnya disebutkan bahwa fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya tersebut dapat berupa:

1) Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2) Pelayanan bongkar muat;
3) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
4) Pemasaran dan distribusi ikan;
5) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
6) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
7) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
8) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
9) Pelaksanaan kesyahbandaran;
10) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
11) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
12) Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
13) Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
14) Pengendalian lingkungan.

Fungsi pelabuhan perikanan berdasarkan pendekatan kepentingan adalah sebagai berikut (Lubis, 2009a):

1) Fungsi Maritim

Pelabuhan perikanan mempunyai aktivitas-aktivitas yang bersifat kemaritiman yaitu merupakan suatu tempat bagi nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapannya. Fasilitas-fasilitas yang mendukung fungsi tersebut adanya dermaga dan kolam pelabuhan.

2) Fungsi Pemasaran

Fungsi ini timbul karena pelabuhan perikanan merupakan suatu tempat awal untuk mempersiapkan pemasaran produksi perikanan dengan melakukan transaksi pelelangan ikan di TPI. Selanjutnya pedagang atau bakul mengambil ikan yang akan dijual atau dibeli secara cepat dan kemudian diberi es untuk mempertahankan mutunya. Ikan dipasarkan dengan menggunakan sarana transportasi seperti truk-truk atau mobil-mobil bak terbuka atau mobil-mobil yang telah dilapisi dengan Styrofoam atau dilengkapi dengan sarana pendingin.

3) Fungsi Jasa

Fungsi ini meliputi jasa-jasa seluruh pelabuhan mulai sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan. Fungsi jasa dapat dikelompokkan menjadi:

a. Jasa-jasa yang melayani pendaratan ikan, antara lain penyediaan alat-alat pengangkut ikan, keranjang-keranjang atau basket plastik dan buruh untuk membongkar ikan;
b. Jasa-jasa yang melayani kapal-kapal penangkap ikan antara lain dalam penyediaan bahan bakar, air bersih dan es;
c. Jasa-jasa yang menangani mutu ikan, antara lain terdapatnya fasilitas old storage, cool room, pabrik es, dan penyediaan air bersih;

d. Jasa-jasa yang melayani keamanan pelabuhan, antara lain adanya jasa pemanduan bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar pelabuhan serta adanya syahbandar untuk memeriksa surat-surat kapal;
e. Jasa-jasa pemeliharaan kapal, antara lain adanya fasilitas docking, slipwaysdan bengkel untuk memelihara kondisi kapal agar tetap dalam kondisi baik dan siap kembali melaut.

Pelabuhan perikanan memiliki berbagai fungsi dalam mendukung kegiatan perikanan laut. Untuk mendukung fungsi pelabuhan perikanan dalam operasionalnya diperlukan fasilitas-fasilitas yang dapat memperlancar kegiatan produksi dan pemasaran hasil tangkapan. Fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan harus memberikan rasa aman bagi nelayan dalam melakukan aktivitasnya, serta dapat memberikan penanganan yang baik terhadap hasil tangkapan yang didaratkan (Lubis).

2.3 Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat untuk memasarkan hasil tangkapan, sebagai salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Pemasaran ikan dilakukan melalui pelelangan. Menurut sejarahnya pelelangan ikan telah dikenal sejak tahun 1922, didirikan dan diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan terutama di Pulau Jawa, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengijon, membantu nelayan mendapatkan harga yang layak (Pramitasari *et al*.,2006).

Pelelangan ikan merupakan kegiatan awal dari pemasaran ikan di pelabuhan perikanan unuk mendapatkan harga yang layak khususnya bagi nelayan (Lubis, *et al*, 2009). Proses menjual dan membeli hasil tangkapan terjadi dalam kegiatan pelelangan ikan, dimana harga hasil tangkapan akan terus menerus naik sampai terdapat kesepakatan harga antara penjual (nelayan) dan pembeli (bakul). Biaya transaksi yang dimaksudkan dalam pelaksanaan pelelangan ikan adalah biaya pelayanan yang ditujukan kepada pengguna fasilitas di TPI, biaya ini ditetapkan oleh suatu lembaga formal. Selain itu, bisa juga terdapat biaya transaksi dari lembaga informal seperti biaya angkut oleh buruh, pungutan liar dan lain sebagainya yang sifatnya tidak resmi (Marwan, 2010).

Tempat pelelangan ikan memegang peranan penting dalam suatu pelabuhan perikanan, oleh sebab itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat tercapai manfaat secara optimal. Fungsi tempat pelelangan ikan adalah untuk melelang ikan, dimana terjadi pertemuan antara penjual (nelayan dan pemilik kapal) dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan perikanan). Letak dan pembagian ruang di gedung pelelangan harus direncanakan supaya aliran produk (flow of product) berjalan dengan cepat (Lubis, 2009a).

Selanjutnya dikatakan bahwa ruangan yang ada pada gedung pelelangan adalah:

1. Ruang sortir yaitu tempat membersihkan, menyortir, dan memasukkan ikan kedalam peti atau keranjang;
2. Ruang pelelangan yaitu tempat menimbang, memperagakkan dan melelang ikan;

3. Ruang pengepakan yaitu tempat memindahkan ikan ke dalam peti lain dengan diberi es, garam, dan lain-lain selanjutnya siap untuk dikirim;
4. Ruang administrasi pelelangan terdiri dari loket-loket, gudang peralatan Lelang, ruang duduk untuk peserta lelang, toilet dan ruang cuci umum.

Lubis (2009a) juga mengatakan bahwa luas gedung pelelangan ikan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Jumlah produksi yang harus ditampung oleh gedung pelelangan;
2. Jenis ikan yang ditangkap;
3. Cara penempatan ikan untuk diperagakan.

Menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 01/MEN/2007 (DKP, 2007), tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi, persyaratan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah:

1) Tempat pelelangan ikan harus memenuhi persyaratan:

1. Terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
2. Mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higiene;
3. Dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan toilet dalam jumlah yang mencukupi. Tempat cuci tangan harus dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai;
4. Mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;

5. Terhindar atau jauh dari kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan;
6. Dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai pelelangan; wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih atau air laut bersih;
7. Dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
8. Mempunyai fasilitas pasokan air tawar dan atau air laut bersih yang cukup;
9. Mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan;

2) Tempat pelelangan ikan harus memenuhi persyaratan hygiene dan penerapan sistem rantai dingin;
3) Pelaku usaha perikanan yang bertanggungjawab pada pelelangan dan pasar induk atau pasar lainnya yang memaparkan produk, harus memenuhi persyaratan berikut:
   a) Harus mempunyai ruang pendingin yang dapat dikunci untuk menyimpan produk perikanan dan mempunyai fasilitas wadah untuk produk yang tidak layak konsumsi pada tempat yang diberi tanda;
   b) Mempunyai tempat khusus untuk unit pengendalian kemanan hasil perikanan.
4) Pada saat memaparkan atau menyimpan hasil perikanan:
   a) Peralatan harus tidak digunakan untuk tujuan lain;
   b) Kendaraan yang mengeluarkan asap yang dapat mempengaruhi produk tidak boleh mengkontaminasi ruangan peralatan tersebut;
   c) Personil yang mempunyai akses ke ruang peralatan tidak diperbolehkan memasukkan binatang lain; dan

d) Peralatan harus memungkinkan dilakukan pengendalian oleh Otoritas Kompeten.

5) Jika pendinginan tidak memungkinkan dilakukan di atas kapal, ikan segar harus didinginkan sesegera mungkin dan disimpan dengan suhu mendekati suhu leleh es;
6) Pelaku usaha perikanan harus bekerjasama dengan otoritas kompeten sehingga memungkinkan petugas pengawas mutu dapat melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7) Tempat pelelangan ikan harus:
   a) Membuktikan kepada otoritas kompeten atas pemenuhan persyaratan sebagaimana pada angka 1 hingga 6;
   b) Tempat Pelelangan Ikan harus menerapkan dan mendokumentasikan GHP (*Good Handling Practices*);
   c) Menjamin bahwa dokumen yang dikembangkan selalu dijaga tetap terkini;
   d) Memelihara dokumen lainnya dan rekaman hingga periode waktu tertentu.

Menurut Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Setiawan 2006), gedung TPI yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Memiliki persediaan air bersih;
2) Memilki wadah atau peti untuk melelang hasil tangkapan;
3) Tidak terdapat genangan air di lantai pelelangan.

2.4 Unit Penangkapan *Purse Seine*

2.4.1. Kapalperikanan

Pada umumnya kapal yang digunakan oleh nelayan-nelayan di Kotamadya Pekalongan terbuat dari jenis kayu jati (*Tectona grandis*). Konstruksi atau

rancang bangun kapal berbeda tergantung alat tangkapnya. Daya tahan kapal dari jenis kayu ini mencapai 15-20 tahun. Daya tahan ini dibutuhkan selama pelayaran menuju daerah penangkapan, ketika melakukan operasi penangkapan dan sewaktu melakukan pelayaran kembali ke pelabuhan (Christanti,2005).

2.4.2. Alat penangkapanikan

Purse seine merupakan alat tangkap yang aktif karena dalam operasi penangkapan kapal melakukan pelingkaran jaring pada target tersebut dengan cara melingkarkan jaring pada gerombolan ikan lalu bagian bawah jaring dikerucutkan dengan menarik *purse line*. Dengan kata lain, ikan yang tertangkap di dalam jaring tidak dapat meloloskan diri. Fungsi dari badan jaring bukan sebagai penjerat, melainkan sebagai dinding yang akan menghalangi ikan untuk lolos. Menurut Von Brandt (1984), *purse seine* digolongkan ke dalam kelompok *surrounding nets*.

Alat tangkap ini memiliki ciri tali ris atas yang lebih pendek daripada tali ris bawahnya. Berbeda dengan alat tangkap lain dalam kelompoknya seperti lampara yang memiliki tali ris atas yang lebih panjang daripada tali ris bawah. Pukat cincin adalah suatu alat tangkap yang berbentuk empat persegi panjang dengan dinding yangsangat panjang. Alat tangkap pukat cincin terdiri atas badan jaring, jaring pada pinggir badan (*selvedge*), kantong (*bunt*), tali atas (*float line*), tali ris bawah (*lead line*), pemberat dan pelampung, serta cincin-cincin yang menggantung pada bagian bawah jaring (Von Brandt,1984).

Bentuk, ukuran, dan bahan yang digunakan *purse seine* bervariasi. Bervariasinya bentuk dan ukuran *purse seine* tergantung pada kebiasaan ikan

yang menjadi tujuan penangkapan, ukuran kapal, waktu operasi, dan jenis ikan yang ditangkap. Menurut Sadhori (1985), *purse seine* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Berdasarkan tipe letakkantong:
   (1) Tipe Amerika
   (2) Tipe Jepang
2) Berdasarkan jumlahkapal:
   (1) Satukapal
   (2) Duakapal
3) Berdasarkan target tangkapan:
   (1) *Purse seine* tuna
   (2) *Purse seine* layang
   (3) *Purse seine* kembung
   (4) Dan sebagainya
4) Berdasarkan waktuoperasi:
   (1) Sianghari
   (2) Malamhari

2.4.3 Kegiatan Operasi Penangkapan Ikan dengan Kapal *Purse Seine*

Alat tangkap *purse seine* merupakan alat penangkap ikan layang yang

dominan di PPN Pekalongan. Pada umumnya, berdasarkan ukuran alat tangkap ini dibedakan menjadi *purse seine* (>60 GT) dan *mini purse seine* (<60 GT) (Christanti, 2005).

Tahapan dalam kegiatan penangkapan ikan dengan *purse seine*, yaitu:

1. Menemukan gerombolan ikan dengan memperhatikan perubahan warna permukaan air laut dan ada tidaknya riak-riak, buih-buih, atau burung-burung yang menyambar permukaanair,
2. Mengidentifikasi kualitas dan kuantitas gerombolanikan,
3. Menentukan faktor kekuatan, kecepatan, arahangin , dan arus, serta menentukan arah dan kecepatan renang gerombolan ikan,
4. Melakukan penangkapan, yaitu dengan melingkarkan jaring dan menarik *purse line* dengan cepat agar gerombolan ikan tidak dapat meloloskan diri dari arah horizontal maupun vertikal,dan
5. Mengangkat jarring dan memindahkan ikan dari bagian *bunt* kepalka dengan *scoop net on fish pumb* (Ayodhyoa, 1981).

Tingkah laku ikan pelagis kecil yang merupakan tujuan penangkapan *purse seine* adalah suka bergerombol di antara jenis ikan itu sendiri maupun bersama-sama dengan jenis ikan lainnya dan tertarik pada cahaya maupun benda terapung. Oleh karena itu, jika ikan belum terkumpul pada suatu *catchable area* atau jika ikan di luar kemampuan tangkap jaring, makaikan dapat diusahakan jaring dan berkumpul dengan menggunakan cahaya, rumpon, dan lain sebagainya (Ayodhyoa, 1981)

2.5 Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar Rp. 4,267,349/bulan. Angka ini naik 8,51 persen dari UMP 2019. Kenaikan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015.

Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta berlaku untuk semua pekerja lajang, dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang domisili tempat kerjanya berada di wilayah Provinsi Jakarta. Upah Minimum Provinsi hanya berlaku jika Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak dapat ditetapkan.

PROVINSI	KETERANGAN			
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Presentasi Kenaikan (%)	SK Gubernur
DKI JAKARTA	3,940,973	4,267,349	8,51	Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2019

Sumber: UMP DKI Jakarta,2020

2.6 Tenaga Kerja dan Sistem Bagi Hasil

2.6.1 Tenaga kerja

Tenaga KerjaMenurut Irham (2006), nelayan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam usaha penangkapan, terutama dalam mengelola faktor-faktor yang terdapat dalam unit penangkapan sehubungan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan di daerahtersebut. Tambunan (2014) menambahkan bahwa

nelayan adalah bagian dari unit penangkapan yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan sebuah operasi penangkapan ikan. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya nelayan dalam menggunakan danmengoperasikan unit penangkapan ikan yang dimiliki. Nelayan adalah orang yang melakukan aktifitas penangkapan atau pemanfaatan hewan atau tumbuhan laut (Sosanto, 2008).Berdasrkan data hasil penelitian, menunjukkan bahwa Nelayan yang bekerja pada usaha perikanan purse seine di Leato Selatan Kota Gorontalo dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu nelayan pemilik dan nelayan buruh atau ABK. Nelayan pemilik yakni nelayan yang memiliki unit penangkapan serta bertanggung jawab atas pembiayaan operasi penangkapan. Nelayan pemilik unit penangkapan purse seinejuga terlibat dalam operasi penangkapan dengan bertindak sebagai nahkoda maupun fishing master. Kemudiannelayan buruh atau ABK menyediakan tenaga untuk secara langsung melakukan penangkapan ikan dengan pembagian tugas baik sebagai nahkoda dan atau fishing master, juru mesin, dan penebar jarring Nelayan di Leato Selatan dalam hal ini para ABK, merupakan penduduk asli desa tersebut. Sebagai nelayan merupakan mata pencaharian utama dari penduduk setempat, sedangkan jika pada saat kapal tidak melakukan kegiatan penangkapan yaitu terutama pada saat musim paceklik nelayan

bekerja sampingan sebagai petani dan memancing.Kegiatan penangkapan purse seine di desa tersebut menggunakan tenaga kerja berjumlah 20 -25 orang. Tenaga kerja (ABK) terbagi menjadi beberapa jabatan fungsional yang terdiri dari, Juragang laut, Juru tawur, Juru mesin, Juru pantau, Juru pelampung, Juru pemberat, Nelayan biasa, Juru mesin kapal jhonson atau slep, Juru hasil tangkapan.

5.4.1 Sistem Bagi Hasil

Sistem pembagian hasil yang berlaku dalam pola perikanan pukat cincin di Leato Selatan, dimana setelah di peroleh hasil penjualan (labakotor) dan Nikè:Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan. Volume 5, Nomor4, Desember 2017setelah di kurangi dengan biaya operasional (pendapatan bersih) kemudian 50% hasil penjualan (laba bersih) menjadi hak pemilik kapal (pemilik usaha), sedangkan 50% sisanya dibagi untuk nelayan. Proses pembagian untuk nelayan yaitu untuk juragan laut (fishing master) memperoleh 2 bagian dan sering mendapat bonus dari pemilik, kemudian untuk juru mesin 1,5 bagian dan untuk nelayan ABK lainnya memperoleh 1 bagian untuk masing-masingnya.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Maret 2020 di Pelabuhan Perikanan Smudera Nizam Zachman Jakarta

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah metode survei wawancara. Jumlah populasi sebanyak 9 kapal dari 3 jensi Gt kapal. Penentuan sampel untuk nelayan tangkap *purse seine* yaitu secara sensus.

Pendapatan usaha merupakan pengurangan penerimaan total (TR) dengan biaya total (TC) dari usaha *purse seine*. Pendapatan menurutSoekartawi (1995) dapatdihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Dimana:

π = Pendapatan dari usaha *Purse seine* di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta (Rp).

TR = Penerimaan Total dari usaha *Purse seine* di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam zachman jakarta (Rp).

TC =Total Biaya (Biaya tetap dan Biaya tidak tetap) dari usaha *Purse seine* di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta (Rp).

Tabel 3.1 Matriks Data

Uraian Data	Jenis Data	Metode Pengambilan Data	Sumber
Biaya Perbekalan	Primer	Wawancara	Pemilik kapal
Harga kapal	Primer	Wawancara	Pemilik kapal
Harga ikan	Primer	Wawancara	Nelayan
Harga alat tangkap	Primer	Wawancara	Pemilik kapal
Biaya perbaikan kapal	Primer	Wawancara	Pemilik kapal
Biaya perbaikan alat tangkap	Primer	Wawancara	Pemilik kapal
Layout PPSNZJ	Sekunder	Literatur	Pihak PPSNZJ
Struktur Organisasi	Sekunder	Literatur	Pihak PPSNZJ